

MENEROPONG KESIAPAN KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI PENYANGGA IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

***Suprayitno¹⁾**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Sejak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia baik di periode 1 maupun periode II, isu akan pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia kembali menghangat ke permukaan. Dan kabar pemindahan nyatanya bukan hanya isu semata namun sudah matang dilakukan oleh Presiden. Pada tanggal 28 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dengan berbagai pertimbangan dan kajian intensif, lokasi ideal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah di Kalimantan Timur tepatnya kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ini, terkait peraturan IKN, Pada tanggal 15 Februari 2022 pemerintah telah menetapkan undang – undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota negara (IKN). Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kota dan provinsi disekitarnya baik dampak positif maupun dampak negative khususnya di Kalimantan Tengah. Keberadaan ibu kota negara di Kalimantan membutuhkan dukungan dari daerah penyangga di sekitarnya. Oleh sebab itu pembangunan IKN sebaiknya dibarengi dengan penyiapan dan pembangunan daerah-daerah penyangga Ibu Kota nantinya. Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara tentunya akan mendapatkan suplay sumber daya dari beberapa provinsi disekitarnya salah satunya Kalimantan Tengah. Perpindahan ibu kota akan mendorong terjadinya perpindahan penduduk yang masif, baik ke ibu kota negara maupun kota-kota penyangga disekitarnya. Tetapi menyiapkan daerah-daerah penyangga tersebut tanpa adanya skema yang baik maka memungkinkan munculnya persoalan-persoalan baru. Salah satu kesiapannya adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam(SDA) Kalimantan Tengah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: IKN; Nusantara ; Penyangga ; Kalimantan Tengah.

PENDAHULUAN

Perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia memang cukup panjang perjalanannya. Jika menelisik lebih jauh, wacana perpindahan ibukota saat itu sudah mulai direncanakan oleh presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno. Dengan dinamika yang panjang, penuh pro dan kontra maupun tarik ulur kepentingan yang luar

biasa wacana pemindahan ibukota negara tersebut dieksekusi pada pemerintahan Joko Widodo di periode II kepemimpinannya di republik ini. Berbagai provinsi di Indonesia dikaji untuk dapat menjadi ibukota baru, tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang dan kajian yang komprehensif dalam memilihnya tidak bisa secara subjektif dilakukan. Dari berbagai kajian yang mendalam saat itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyampaikan dari beberapa provinsi yang berpotensi menjadi ibukota negara terpilih 3 kandidat provinsi yang berpeluang besar menjadi Ibukota baru yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Hasil yang ditunggu tunggu masyarakat pun pada akhirnya menjadi kejutan seperti karakter presiden Jokowi yang memang penuh kejutan. Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden dalam konferensi pers dihadapan para menteri dan kepala daerah mengumumkan bahwa Ibukota baru yang dipilih yaitu Provinsi Kalimantan Timur tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

Meskipun Kalimantan Tengah yang pernah digadang – gadang sebagai salah satu kandidat kuat ibukota baru namun pada akhirnya tidak terpilih, tentu hal ini bukan alasan untuk tidak menyiapkan berbagai sektor pembangunannya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya untuk terus maju. Tidak terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai ibukota baru tidak boleh mematahkan semangat berbagai pembangunan berkelanjutan kedepannya. Toh dengan berpindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur ini menjadi pemacu agar Kalimantan Tengah progresif dalam pembangunan di berbagai sektor karena bagaimanapun Kalimantan Tengah akan menjadi salah satu provinsi penyangga ibukota baru. Sebagai penyangga ibukota negara nusantara, posisi Kalimantan Tengah sangat strategis karena beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Wahyu Baskoro (2005) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Sementara itu Torsina (1987) menjelaskan bahwa upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, dijelaskan yang dimaksud upaya adalah usaha,

ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Upaya juga tidak terlepas dengan adanya strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Argyris dalam Rangkuty (2001) mengatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. Sedangkan menurut David (2004) strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud yaitu data – data yang dikumpulkan dalam tulisan ini bersumber dari dokumen – dokumen secara manual ataupun digital yang baik yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi. Dokumen yang ditampilkan dalam tulisan ini berasal baik referensi hasil riset terdahulu yang dipublikasi, kebijakan ataupun dalam bentuk naskah publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan maupun dokumentasi hasil – hasil kegiatan untuk mendukung tulisan yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan undang – undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara, disebutkan bahwa otorita Ibukota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir 2022. Hal ini berarti tinggal menghitung hari maka proses operasional di IKN sudah harus sudah berjalan. Lalu bagaimana kesiapan Kalimantan Tengah yang digadang – gadang sebagai salah satu penyangga IKN ?. Tentu, kebijakan kepala daerah di Kalimantan Tengah juga harus progresif baik menyangkut pengelolaan SDM maupun SDA nya agar kita tidak hanya jadi penonton semata. Sebagai penyangga IKN, wilayah Kalimantan dan Kalimantan Tengah khususnya kedepannya memiliki peluang yang besar dalam bidang ekonomi untuk mensupply kebutuhan – kebutuhan dasar maupun kebutuhan penunjang dalam skala besar. Potensi ini tentu akan menguntungkan Kalimantan Tengah dengan catatan Kalimantan Tengah sudah siap dengan berbagai sector unggulannya. Namun tentu akan rugi Kalimantan Tengah jika peluang tersebut

berlalu begitu saja. Jika sebelum IKN di Kalimantan Timur, pusat perekonomian terbesar negara ini di pulau Jawa maka dengan adanya IKN mau tidak mau, suka tidak suka pusat ekonomi akan terbagi di wilayah pulau Jawa dan pulau Kalimantan.

Sebagai bagian episentrum penyangga ekonomi, maka Kalimantan Tengah tidak bisa biasa – biasa saja hanya mengandalkan potensi seperti yang sudah – sudah. Jika hanya mengandalkan sawit dan tambang maka jargon Kalimantan Tengah sebagai penyangga ibukota negara hanya akan angin lalu saja. Perlu adanya pusat – pusat produksi baru di Kalimantan Tengah agar mampu menjadi produsen barang – barang unggulan untuk mencukupi kebutuhan di IKN. Kepala Daerah se-Kalimantan harus memperkuat kolaborasinya agar dapat berbagi peran agar kebutuhan ekonomi mampu di supply oleh provinsi penyangga.

Kalimantan Tengah telah mendapatkan salah satu proyek nasional yang fantastis yaitu program food estate. Lokasi food estate yang saat ini masih berjalan dan menjadi prioritas yaitu berada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Program Food estate sangat penting

dalam meningkatkan ketahanan pangan yang berdaulat bagi Indonesia. Harapannya dengan adanya food estate di Kalimantan Tengah maka Kalimantan Tengah akan menjadi andalan penyedia pangan bagi kebutuhan IKN kedepannya.

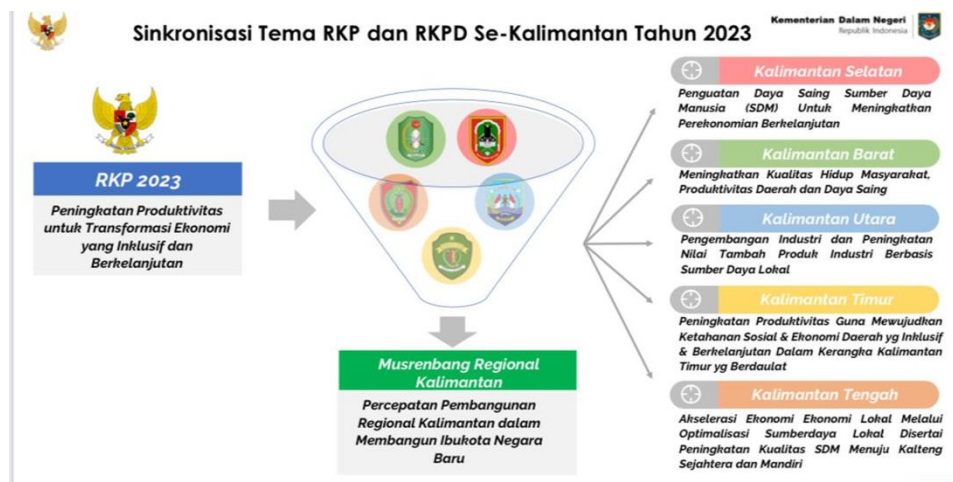
Dengan adanya program nasional food estate ini maka yang diharapkan bahwa Kalimantan Tengah kedepannya menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia yang mampu mencukupi kebutuhan pangan baik di tingkat lokal, regional atau bahkan nasional. Dengan adanya program food estate diharapkan akan berpengaruh kepada sektor – sektor pembangunan – pembangunan lainnya diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kelistrikan dan juga pembangunan SDM yang ada di Kalimantan Tengah. Selain itu diharapkan dengan adanya food estate Kalimantan Tengah mulai bisa membangun unit usaha yang mampu mendukung program keberlanjutan food estate seperti pabrik produksi, pengemasan dan juga teknologi – teknologi baru dalam bidang pertanian dan peternakan sehingga semakin banyak peluang ekonomi yang mampu digerakkan di Kalimantan Tengah. Food estate harus dimanfaatkan oleh Kalimantan Tengah sebagai *center of excellence* (pusat

pengembangan) dimana dengan adanya food estate dan pemenuhan pangan maka Kalimantan Tengahlah yang harus unggul untuk menyuplai kebutuhan IKN dan Nasional kedepannya.

Kalimantan Tengah harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap dalam berbagai sektor untuk mendukung berbagai sektor unggulan di Kalimantan Tengah. Pemberian beasiswa – beasiswa dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi harus terus menjadi salah satu prioritas agar SDM Kalimantan Tengah dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Selain itu, dengan wilayah Kalimantan Tengah yang cukup luas pusat-pusat pendidikan tinggi mayoritas terpusat di Palangka Raya. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri, Maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah harus memikirkan agar ada distribusi kampus – kampus di berbagai wilayah agar semakin memudahkan SDM Kalimantan Tengah dalam menempuh pendidikan setinggi – tingginya. Kolaborasi yang dilakukan oleh Kalimantan Tengah bersama dengan provinsi – provinsi lain di Kalimantan dalam mendukung IKN tentu harus terus digaungkan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan agar sebagai daerah penyangga IKN dapat menjalankan hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Strategi penguatan kapabilitas *supporting* daerah penyangga (yang dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan kualitas SDM lokal)
2. Strategi penguatan kolaborasi/ kerjasama regional antar daerah penyangga IKN
3. Strategi Penguatan Peran Provinsi Sekalimantan dalam IKN
4. Strategi Penguatan fungsi penyangga IKN dalam kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Dari keempat startegi tersebut, pemerintah daerah se Kalimantan telah menerjemahkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2023. Berikut adalah bentuk sinkronisasi RKP dan RKPD tahun 2023. :



Sumber : sekretariat daerah Kalimantan Tengah tahun 2022

Dari Gambar diatas dapat kita analisis bahwa Kalimantan Tengah tahun 2023 masih menasar pada peningkatan kualitas SDM. Maka agar SDM Kalimantan Tengah mumpuni dan memiliki daya saing tinggi, rencana peningkatan kualitas SDM itu harus progresif segera dilakukan dengan langkah – langkah yang sistematis, terukur dan berkelanjutan. Sumber daya alam (SDA) Kalimantan Tengah yang melimpah akan tidak bermanfaat secara menyeluruh bagi masyarakatnya jika pengelolaannya diserahkan kepada SDM dari luar.

Dengan adanya IKN, sudah tentu akan banyak SDM dari luar yang mulai merapatkan diri untuk berpindah ke Kalimantan. Jika SDM Kalimantan Tengah tidak siap akan migrasi besar – besaran tersebut maka dalam berbagai sektor akan kalah bersaing dengan SDM. SDM Kalimantan Tengah, jika ingin sukses dalam partisipasinya sebagai Penyangga IKN maka harus sebagai objek dan juga subjek pembangunan tersebut.

Dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Induk IKN menetapkan kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan oleh daerah mitra (penyangga) diantaranya adalah Pendidikan Tinggi, Industri alat angkut, Industri energi terbarukan, Industri manufaktur, industry farmasi, Agroindustri, Pertanian, Agrowisata, Wisata kesehatan dan kebugaran, dan Konstruksi.

Dari gambaran pengembangan ekonomi dalam peraturan pemerintah diatas maka Kalimantan Tengah saat ini sudah harus tau apa kelebihan dan kekurangannya sebagai

penyangga IKN. Maka harus segera dipetakan dan dibuat program yang terencana dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sukseksi perpindahan IKN di Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga IKN di Kalimantan Tengah pada pada RKP dan RPKD tahun 2023 fokus pada optimalisasi sumber daya lokal. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Tengah dalam menyongsong perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar SDM Kalimantan Tengah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang siap bersaing apapun dan dimanapun berada. Selain optimalisasi SDM, Kalimantan Tengah juga harus mulai bijak dalam pengelolaan SDA (sumber daya alam) yang ada di provinsi ini. Hal ini karena SDA ini akan berimplikasi kepada banyak hal yang berpengaruh terhadap hajat orang banyak khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Sebagai upaya memperkuat posisi tawar Kalimantan Tengah dalam IKN, maka Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah harus aktif berkolorasi dengan provinsi lain di Kalimantan maupun diluar Kalimantan agar mampu menjadi provinsi unggulan khususnya yang digadang – gadang sebagai lumbung pangan nasional dalam program food estate. Berbagai kebutuhan untuk mendukung IKN tentu sangat besar dan Kalimantan Tengah punya pontensi untuk menjadi salah satu provinsi yang sukses sebagai penyangga IKN asalkan perencanaan pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM dan pengelolaan SDA dikelola dengan baik dan terencana mulai dari saat ini..

REFERENSI

- Aziz, Iwan J. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi*. Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Baskoro, Wahyu. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Setia Kawan
- Edison, Muhammad Noor Fazri, Suprayitno, Ni Wayan Sukraini. 2020. *Environmentally Friendly And Economically Sustainable Local Peatland Cultivation Strategies*. Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik. 21(2), 171-178.
- Repository.pip-semarang.ac.id

Riwut, T. (1993). *Kalimantan membangun, alam, dan kebudayaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Yestati, Ariani & Rico Septian Nor. *Food estate dan perlindungan terhadap hak – hak masyarakat di Kalimantan Tengah*. *Morality : Jurnal Hukum*. 07(01).

Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Induk IKN

Undang – Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara

<https://kalteng.antaranews.com>

<https://kalteng.bps.go.id/>

<https://kumparan.com>

<https://www.pertanian.go.id>